

ABSTRAK

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhitung sejak Januari 2022 hingga proposal ini ditulis terdapat 18.524 kasus dengan 2.996 korban laki-laki dan 16.987 korban perempuan. Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini peraturan mengenai tindak kekerasan seksual diatur dalam beberapa aturan perundang – undangan, diantaranya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Eksistensi perundang-undangan yang cukup banyak ini memungkinkan terjadinya *overlapping* dalam beberapa kasus, dalam hal ini terdapat asas *Concursus Idealis* yaitu satu perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Salah satu cara menangani *overlapping* ini adalah adanya reformulasi kebijakan hukum pidana agar dalam pelaksanaannya dapat optimal dan efisien.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, *Overlapping*, *Concursus Idealis*

ABSTRACT

Criminal acts of sexual violence are all acts that fulfill the elements of a criminal act as regulated in the Criminal Act of Sexual Violence and other acts of sexual violence as regulated in the Law to the extent specified in this Law. According to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, from January 2022 until this proposal was written, there were 18,524 cases with 2,996 male victims and 16,987 female victims. Prior to the existence of the Sexual Violence Crime Law, regulations regarding sexual violence were regulated in several laws and regulations, including the Law on the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 of 2004), the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), and the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking (Law No. 21 of 2007). The existence of quite a lot of legislation allows for overlapping in several cases, in this case there is the principle of Concursus Idealis, namely an act that is included in more than one criminal regulation. One way to deal with this overlap is to reformulate criminal law policy so that its implementation can be optimal and efficient.

Keywords: Sexual Violence, Overlapping, Idealist Concursus